

Membangun masyarakat tertib damai melalui penyelenggaraan pendidikan vokasional yang berwawasan ke-Bhineka-an

Subagyo^{a*}, Ardi Widyatmoko^b, Suparmin^c

Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, FKIP, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

* Corresponding Author. Email: yokssubagyo@gmail.com;

ardiwidyatmoko@ustjogja.ac.id; suparminmt@ustjogja.ac.id

Received: 31 November 2020; Revised: 5 December 2020; Accepted: 31 December 2020

Abstrak: Latar belakang penulisan didasarkan fenomena dimasyarakat saat ini yang terpolarisasi menjadi kelompok-kelompok dan semakin sulit disatukan. Ada sebagian masyarakat yang berkeinginan merubah dasar negara Indonesia yang bertentangan dengan prinsip keragaman dan sifat toleran terhadap agama, suku, dan budaya yang ada selama ini. Tujuan penulisan ini adalah mencermati latar belakang masing-masing sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Populasi penelitian ini adalah SD & MI negeri maupun swasta yang ada di wilayah DIY. Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kuantitatif, data statistik diperoleh berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penganut agama, serta penyelenggaraan sekolah yang ada di lima (5) kabupaten kota, yang terdiri dari kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kabupaten Gunungkidul, kabupaten Kulonprogo, dan kabupaten kota Yogyakarta. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk tabulasi, dan dianalisis berdasarkan prosentase. Hasil penelitian ini adalah penyampaian data jumlah sekolah sesuai afiliasinya yang ada di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Manfaat penelitian ini bisa sebagai masukan pembuatan kebijakan perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) penyelenggaraan pendidikan khususnya sekolah formal bagi pembukaan sekolah baru. Keberadaan sekolah umum dan sekolah yang berafiliasi organisasi sosial keagamaan perlu ditata kembali. Proporsinya harus tepat agar tidak muncul arogansi akibat dominasi kuantitatif dari jumlah sekolah dan anggotanya.

Kata kunci: pendidikan yang religius; wawasan ke-Bhineka-an; jiwa toleransi

Building a peaceful orderly society through the implementation of vocational education with an insight of diversity

Abstract: The background of writing is based on phenomena in today's society which are polarized into groups and are increasingly difficult to unite. There are some people who want to change the basis of the Indonesian state which is contrary to the principles of diversity and tolerance towards religions, ethnicities and cultures that have existed so far. The purpose of this paper is to examine the background of each elementary school level and Madrasah Ibtidaiyah (MI) in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The population of this research is public and private SD & MI in DIY. This research is classified as a quantitative descriptive study, statistical data is obtained based on the population, number of religious followers, and school administration in five (5) city districts, which consist of Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulonprogo, and city districts. Yogyakarta. The data obtained were arranged in tabulated form and analyzed based on the percentage. The result of this research is the submission of data on the number of schools according to their affiliations in the province of Yogyakarta Special Region. The benefit of this research is that it can be used as input for policy making in the legislation of the House of Representatives for the implementation of education, especially formal schools for the opening of new schools. The existence of public schools and schools affiliated with socio-religious organizations needs to be reorganized. The proportion must be correct so that arrogance does not appear due to the quantitative domination of the number of schools and their members.

Key words: religious education; insight into diversity; soul of tolerance



How to Cite: Subagyo, Ardi Widyatmoko, Suparmin. (2020). Membangun masyarakat tertib damai melalui penyelenggaraan pendidikan vokasional yang berwawasan ke-Bhineka-an. *Jurnal Taman Vokasi*, 8(2), 107-115. doi:<http://dx.doi.org/10.30738/jtv.v8i2.9054>

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan berawal dari pengamatan peneliti bahwa setiap akan ada pemilihan kepala daerah atau kepala negara sering terjadi ketidakharmonisan hubungan antar individu, antar keluarga antar masyarakat yang disebabkan perbedaan pilihan yang dapat mengusik rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Seiring dengan itu ironisnya sering kelompok atau orang-orang tertentu yang



berusaha melibatkan sekolah menjadi partisan pendukungnya. Secara jelas dalam peraturan pemerintah bahwa sekolah tidak boleh berpolitik praktis, namun untuk mendulang perolehan suara sebanyak-banyaknya, kelompok, atau orang-orang tertentu berusaha melibatkan organisasi sekolah atau yayasan tertentu ikut menjadi partisannya. Pendidikan formal milik pemerintah maupun swasta punya peran yang dominan didalam membangun negeri ini. Nilai-nilai kebaikan yang terjadi di masyarakat tentu tidak bisa diperoleh secara instan, perlu waktu yang panjang untuk membangunnya. Peran pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan dan tidak meninggalkan nilai-nilai religiusitas keagamaan didalam kehidupan sosialnya.

Pendidikan yang membentuk karakter bangsa adalah pendidikan yang membentuk kualitas perilaku kolektif yang tecermin dalam bentuk sikap dan perilaku yang berasal dari kesadaran diri, pemahaman terhadap objek, rasa dan karsa sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa dari seseorang atau kelompok orang. Karakter bangsa Indonesia haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, mengakui adanya keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan merupakan usaha sadar, terencana dan terstruktur guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dilakukan secara aktif untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki kemampuan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa dan negara. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah membangun generasi mendatang memiliki jiwa toleran, berwawasan ke-bhineka-an serta memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negaranya. Hal itu akan terwujud jika terbangun peradaban dan budaya yang maju melalui penyelenggaraan sekolah yang bermartabat. Prinsip ke-Bhineka-an telah dibangun founding father bangsa Indonesia sejak dulu baik terhadap suku, bangsa, agama, dan budaya. Penelitian ini termasuk penelitian populasi, bentuk data penelitian adalah semua Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di Propinsi DIY.

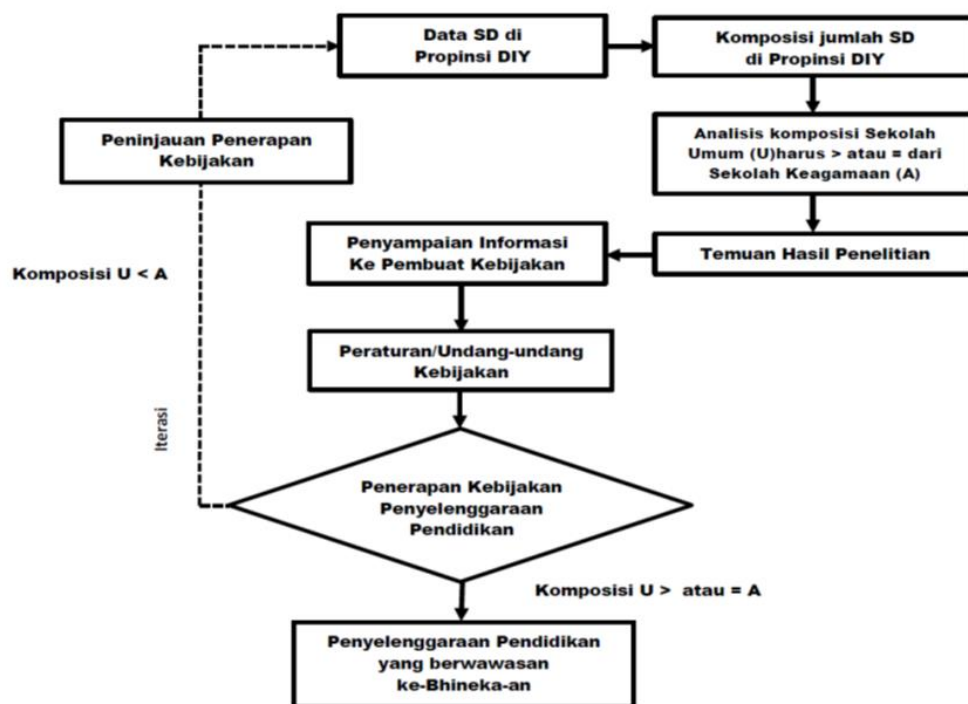
Manfaat dari penelitian ini adalah tersampainya informasi tentang cara menjadikan sekolah menjadi sekolah yang berbudaya, religius, dan memiliki jiwa toleran. Harapannya adalah bisa meredam munculnya paham radikal akibat arogansi kuantitatif dari realitas yang ada. Dinamika sosial kemasyarakatan sangat dipengaruhi perubahan global yang terdorong fasilitas digital yang penyebarannya sangat cepat, masif, dan tanpa batas. Dalam peradaban global suatu keniscayaan yang keberadaannya tidak bisa dicegah, agar masyarakat bisa hidup lebih maju wajib mengadopsi dan mengadaptasi informasi-informasi yang tidak merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman suku, etnis, bahasa, dan agama di Indonesia merupakan kenyataan yang ada sudah sejak dulu dan tidak bisa dibantah. Munculnya kelompok masyarakat yang intoleransi didalam berbangsa dan bernegara bisa mengancam keutuhan negara seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Permasalahan yang sering muncul dari keragaman ini adalah bagaimana hal itu bisa disatukan dengan tidak menimbulkan kericuhan/kegaduhan sejak dini melalui dunia pendidikan didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memaknai pesan yang terkandung didalam tulisan ini akan menyadari bahwa keseimbangan antara kuantitas dan kualitas didalam penyelenggaraan pendidikan dapat meredam serta menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara.

Tinjauan Pustaka

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seseorang atau sekelompok orang sering dihadapkan pada pilihan untuk mengambil sikap sebagai pilihan terbaik menurut dirinya. Pilihan untuk menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki hati yang lapang dan penuh toleran, atau sebaliknya sebagai intoleran. Intoleran merupakan kondisi dimana seseorang atau kelompok orang secara spesifik menolak terhadap praktik-praktik penganut, atau kepercayaan yang berbeda dengan dirinya atau kelompoknya. Kata toleransi menurut KBBI Online (diunduh 22 Feb. 2020) berasal dari bahasa Latin "*tolerare*", toleransi berarti sabar dan menahan diri. Sering kata toleran atau intoleran dihubungkan dengan prinsip ke-Bhineka-an. Toleran bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Kata "intoleran" artinya tidak ada tenggang rasa atau tidak toleran di sebabkan adanya ketidak samaan pemikiran atau pandangan antara dua belah pihak atau lebih disebabkan adanya keterbatasan pengetahuan, latar belakang politik, dan atau keyakinan. Kata Bhineka kependekan dari kata "Bhineka Tunggal Ika" berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Nilai-nilai yang ada selama ini merupakan nilai-nilai kebaikan yang diperoleh secara turun temurun, karena itu perlu menjadi perhatian masyarakat dan

adanya keterlibatan pemerintah dalam pengaturannya. Adanya sikap toleransi diharapkan bisa menciptakan kedamaian di muka bumi, seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki suku, bahasa, budaya, agama yang berbeda-beda. Tidak ada pilihan lain, sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau toleransi harus terus dijaga dan dipertahankan supaya negara ini tetap damai. Menjaga toleransi tetap ada menurut Michael Wazler (1997), toleransi merupakan keniscayaan terhadap ruang publik dan individu karena tujuan toleransi adalah membangun hidup damai (peaceful coexistence) di antara berbagai kelompok masyarakat dari berbagai perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas.

Disekolah anak akan mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat untuk membangun pengetahuan afeksinya, pengetahuan kognisinya, dan pengetahuan psikomotoriknya. Sekolah menjadi tumpuan orang tua dalam mempercayakan anak-anaknya untuk mencari ilmu dan mengembangkan pribadinya. Sekolah yang sehat dan berdaya akan terwujud jika didukung oleh orang tua/wali murid, pemerintah, maupun masyarakat. Proses pendidikan berlangsung di tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat dan ketiga lingkungan inilah yang disebut sebagai "Tripusat Pendidikan". Didalam hidupnya anak, ada tiga tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yaitu; alam keluarga, alam perguruan dan alam pergerakan pemuda" (Ki Hajar Dewantara, 2004:70). Penanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga merupakan guru pertama dalam pribadi anak, dengan keluarga pribadi anak akan terbentuk sebagaimana kondisi lingkungan kesehariannya. Proses pendidikan itu sudah berlangsung sejak anak itu lahir, karena anak merupakan komunitas dari keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, kakak, adik dan saudara-saudara yang lain. Lingkungan ke dua setelah keluarga adalah dimana anak itu bersosialisasi dan tinggal dalam arti masyarakat. Lingkungan masyarakat sedikit banyak ikut andil dalam pembentukan pribadi anak. Anak yang tumbuh kembangnya didalam lingkungan yang nyaman dan kondusif akan memberi kebahagiaan didalam hidupnya demikian sebaliknya. Lingkungan ketiga dari perkembangan anak adalah lingkungan sekolah, sekolah merupakan lingkungan yang akan memberi banyak pengalaman dalam rangka membentuk anak menjadi manusia seutuhnya (Ki Sunarno, 2006:80). Pemerintah mempunyai peran sentral didalam mengantisipasi serta mengatasi berbagai ancaman yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan menata kembali keberadaan antara sekolah umum dengan sekolah-sekolah yang berafiliasi kepada organisasi sosial dan keagamaan. Adapun alur pemikiran terkait dengan penelitian dapat dilihat pada diagram alir sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Penyelenggaraan Pendidikan yang berwawasan ke-Bhineka-an

Pendidikan merupakan investasi yang wajib didukung keberlangsungannya oleh negara. Keberadaannya harus sejalan dengan kemajuan politik, pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Berbagai perubahan dimasyarakat akan melahirkan tantangan internal dan eksternal di bidang pendidikan. Implikasi dari berbagai pengetahuan di era informasi bisa berdampak positif atau negatif tergantung bagaimana menyikapinya. Kehadiran negara dalam suasana perpolitikan yang semakin dinamis sangatlah dibutuhkan. Hakikat pendidikan adalah membentuk karakter yang ditentukan semangat, motivasi, nilai-nilai, dan tujuan hidup, hakikat pendidikan mampu membentuk karakter yang berkeadaban. Pendidikan merupakan hal yang hakiki dalam hidup, melalui pendidikan pesan-pesan tentang kehidupan bersama ditanamkan didalam jiwa dan pikirannya sejak usia dini bahkan sampai akhir hayat sebagai *life long education* sehingga kehidupan menjadi terarah, terkendali dan bermakna. Pendidikan karakter menjadi unsur utama dalam pencapaian visi dan misi pembangunan nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025. Menjadikan peserta didik berkarater adalah tugas pendidikan, yang esensinya membangun manusia seutuhnya. Pengertian berkarater mengacu pada norma yang dianut didalam nilai-nilai luhur Pancasila. Butir-butir Pancasila sepenuhnya terintegrasi dalam harkat dan martabat manusia yang terdiri atas tiga komponen, yaitu hakikat manusia, pancadaya kemanusiaan, dan dimensi kemanusiaan (Alwis, 2011;1).

Keluarga merupakan guru pertama dalam pribadi anak, dengan keluarga pribadi anak sedikit banyak akan terbentuk akibat lingkungan kesehariannya. Proses pendidikan sudah berlangsung sejak anak lahir, karena anak merupakan komunitas dari keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, kakak, adik dan saudara-saudara yang lain. Lingkungan kedua adalah lingkungan dimana seorang anak bersosialisasi dan tinggal dalam arti masyarakat. Lingkungan masyarakat ikut andil didalam pembentukan pribadi anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang nyaman dan kondusif akan memberi kebahagiaan dalam hidupnya demikian sebaliknya. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang memberi banyak pengalaman dan membentuk anak menjadi manusia seutuhnya (Ki Sunarno, 2006;80). Agama di Indonesia memegang peran penting dalam kehidupan masyarakatnya. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah sosial seperti; kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Negara memberi kebebasan bagi penduduknya untuk memilih agama yang diyakininya. Kebebasan memilih merupakan hak azazi karena itu dilindungi negara dan tidak seorangpun boleh memaksa kehendaknya dalam memilih agama. Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (*Confusius*).

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif dimana peneliti menggali informasi tentang jumlah Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang ada di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya dihitung jumlah masing jenis lembaga sekolah yang ada, untuk selanjutnya dihitung berdasarkan prosentase. Data penelitian diperoleh dari data statistik mulai dari jumlah penduduk, jumlah sekolah yang ada, serta afiliasi dari lembaga atau yayasan sekolah yang diselenggarakan. Adapun alur penelitian tentang penyelenggaraan sekolah Dasar ini dimulai dari pengambilan data lapangan, mengelompokkan jenis sekolah, menganalisis data, dan menginterpretasikan hasil temuan berdasarkan teori yang terdapat dalam kajian pustaka. Sebagai subjek penelitian ini adalah SD dan MI yang ada di lima (5) Kabupaten Kota yaitu; Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Madya Yogyakarta. Kemudian sebagai objeknya adalah jumlah sekolah negeri, jumlah sekolah swasta umum, dan jumlah sekolah swasta yang berafiliasi keagamaan. Pengambilan data dilakukan melalui survei lapangan melalui kantor dinas pendidikan yang terdapat di lima Kabupaten Kota.

Analisis data berdasarkan prosentase untuk melihat komposisi antara sekolah umum dan sekolah agama dan yang berafiliasi keagamaan. Kemudian narasi untuk menjelaskan hasil temuan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diolah berdasarkan kajian pustaka, kemudian untuk menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif.

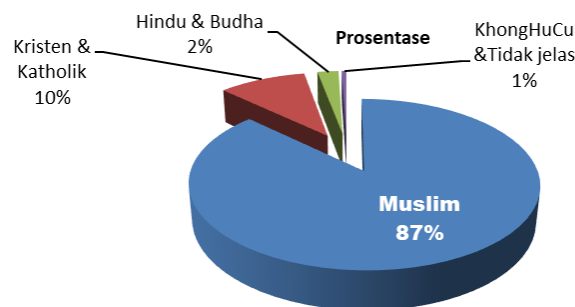
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa sekolah umum dan sekolah agama dan yang berafiliasi keagamaan kemudian disusun dalam bentuk grafik dari kelompok sekolah yang ada. Dalam penelitian ini ditampilkan jumlah lembaga sekolah dalam prosentase selanjutnya ialah menyampaikan saran kepada pihak yang berkompeten perlu mempertimbangkan komposisi dari kelompok sekolah umum dan kelompok sekolah yang berafiliasi keagamaan, terutama bagi sekolah-sekolah yang akan dibuka.

Adapun gambaran tentang pemeluk agama di Indonesia dan jumlahnya penduduk Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Agama yang Dianut Penduduk Indonesia Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (BPS, 2010)

No.	Agama	Jumlah	Prosentase	Prosentase	Kelompok
1.	Islam	207.176.162	87,14	87,14	Muslim
2.	Kristen	16.528.513	6,92	9,93	Kristen & Katholik
3.	Katholik	6.907.873	2,91		
4.	Hindu	4.012.116	1,68	2,4	Hindu & Budha
5.	Budha	1.703.254	0,72		
6.	Khong Hu Cu	117.091	0,03		
7.	Lainnya	299.617	0,12	0,53	Khong Hu Cu & Tidak jelas
8.	Tidak Terjawab	896.700	0,38		
Jumlah		237.641.326	100	100	-



Gambar 2. Grafik Penduduk Berdasarkan Penganut Agama

Berdasarkan tabel 1 disampaikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam (Muslim) sebesar 87,14%, penduduk beragama Kristen & Katholik sebesar 9,93%, Penduduk beragama Hindu & Budha 2,4%, dan yang beragama Khong Hu Cu & Tidak jelas 0,53%, dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut, yang beragama Islam 207.176.162 jiwa, penduduk yang beragama Kristen dan Katholik sebesar 23.436.386 jiwa, penduduk yang beragama Hindu dan Budha sebesar 2.473.417 jiwa, dan kelompok agama Khong Hu Cu, lainnya, dan yang tidak menjawab adalah sebesar 1.313.408 jiwa.

Tabel 2. Pengelompokan Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama atau Afiliasi Agama (BPS, 2010)

No.	Agama	Jumlah Penduduk	Jumlah Siswa	Prosentase	Dalam %
1.	Islam	207.176.162	207.176.162	87,66470071	87,665
2.	Kristen	16.528.513	23.436.386	9,91689268	9,917
3.	Katholik	6.907.873			
4.	Hindu	4.012.116	5.715.370	2,418406614	2,418
5.	Budha	1.703.254			
Jumlah		236.327.918	236.327.918	100	100

Jika kelompok penduduk yang beragama Kong Hu Cu, lainnya, dan yang tidak menjawab dimasukkan kelompok Sekolah Umum (SU), sehingga komposisinya menjadi 104.901.489 penduduk di SU, dan 102.274.673 penduduk masuk Sekolah Agama atau Sekolah Berafiliasi Agama (SA/SBA), dan SU harus lebih besar atau atau maksimal sama dengan SA/SBA ($SU > SA/SBA$) atau SA/SBA maksimal = SU

Tabel 3. Jumlah Penduduk yang Bisa Ditampung di Sekolah Agama atau Afiliasi Agama

Proporsi Jumlah Penduduk yang Bisa Bersekolah di Sekolah Agama atau Afiliasi Agama (Total)	Jenis Sekolah	Dalam %	Jumlah
102.274.673	Islam	87,665	89.659.092
	Kristen & Katholik	9,917	10.142.579
	Hindu & Budha	2,418	2.473.002
Jumlah		100	102.274.673

Berdasarkan status agama yang dianut dari masing-masing individu tersebut selanjutnya bisa diketahui besaran proporsi dari jumlah sekolah-sekolah yang boleh diselenggarakan oleh pemerintah dan atau swasta, sekolah yang diselenggarakan lembaga/yayasan Islam (Muslim) dan sekolah yang diselenggarakan lembaga/ yayasan Kristen-Katholik, dan lembaga/yayasan Hindu-Budha. Proporsi dari distribusi sekolah negeri & swasta sebagai perwakilan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia yang bisa ditampung disekolah Islam sebesar 87,665% dari 102.274.673 jiwa, adalah 89.659.092,08 jiwa. Jumlah penduduk yang bisa ditampung disekolah Kristen & Katholik sebesar 9,917% dari 102.274.673 jiwa, adalah 10.142.579 jiwa. Jumlah penduduk yang bisa ditampung disekolah Hindu & Budha sebesar 2,418% dari 102.274.673 jiwa, adalah 2.473.002 jiwa.

Berdasarkan survei lapangan terhadap sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang terdapat di Yogyakarta yang terdapat di tabel 4 diperoleh data bahwa jumlah sekolah SD Negeri 1441 sekolah, dan MI Negeri 21 sekolah. Kemudian berdasarkan tabel 5, jumlah sekolah SD swasta 402 sekolah, dan MI swasta 147 sekolah. Sekolah negeri dan sekolah swasta tersebut tersebar di lima (5) kabupaten kota yang terdiri dari kabupaten Gunungkidul, kabupaten Kulonprogo, kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan kotamadya Yogyakarta.

Tabel 4. SD Negeri & MI Negeri di Yogyakarta

SD & MI Negeri	Kodya Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Jumlah
SD Negeri	90	377	281	419	274	1441
MI Negeri	1	2	3	12	3	21
Jumlah N	91	379	284	431	277	1462

Tabel 5. SD Afiliasi Agama & MI (N & S) di Yogyakarta

SD Afiliasi Agama & MI (N & S)	Kodya Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Jumlah
SD Muhammadiyah	40	77	51	32	40	240
SDIT	3	18	14	6	4	45
SD Islam Lain	3	4	3	1	-	11
MI Negeri	1	2	3	12	3	21
MI Swasta	1	25	27	68	26	147
Jumlah	48	126	98	119	73	464

Tabel 6. SD (Berafiliasi Agama) & MI (Negeri & Swasta) di Yogyakarta

SD Afiliasi Agama & MI (N & S)	Kodya Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Jumlah
SD Muhammadiyah	40	77	51	32	40	240
SDIT	3	18	14	6	4	45
SD Islam Lain	3	4	3	1	-	11
SD Kanisius	14	19	8	7	8	56
SD Bobkri	4	4	2	7	7	24
SD Pangudi Luhur	2	-	1	-	2	5
MI Negeri	1	2	3	12	3	21
MI Swasta	1	25	27	68	26	147
Jumlah	68	149	109	133	90	549

Tabel 7. SD Swasta Umum di Yogyakarta

SD Swasta Umum	Kodya Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Jumlah
SD Taman Muda	2	-	-	-	-	2
SD Budi Mulya	-	2	1	-	-	3
SD Swasta lain	8	7	-	1	-	16
Jumlah	10	9	1	1	-	21

Tabel 8. SD Kristen & Katholik di Yogyakarta

SD Kristen & Katholik	Kodya Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Jumlah
SD Kanisius	14	19	8	7	8	56
SD Bobkri	4	4	2	7	7	24
SD Pangudi Luhur	2	-	1	-	2	5
Jumlah SD Kris. & Kat.	20	23	11	14	17	85

Tabel 9. SD Negeri & SD Swasta Umum di Yogyakarta

SD (N & S) Umum	Kodya Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Jumlah
SD Negeri	90	377	281	419	274	1441
SD Swasta Umum	10	9	1	1	-	21
Jumlah	100	386	282	420	274	1462

Tabel 10. SD (N & S) Umum, SD Afiliasi Agama & MI (N & S) di Yogyakarta

SD & MI N + S	Kodya Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunung Kidul	Kab. Kulon Progo	Jumlah
SD (N & S) Umum	91	379	284	431	277	1462
SD Afiliasi Agama & MI (N & S)	68	149	109	133	90	549
Jumlah	159	528	393	564	367	2011

Proporsi jumlah sekolah dan madrasah negeri & swasta yang terdistribusi di lima kabupaten Kota yang terdapat di Yogyakarta sebagai perwakilan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bisa ditampung disekolah agama atau yang berafiliasi agama, maksimum (paling banyak) sama dengan jumlah penduduk yang bersekolah disekolah umum. Sekolah Agama & yang berafiliasi Agama Islam ($2011/2 = 1005,5$ dibulatkan menjadi 1005). Jadi jumlah sekolah yang boleh ada maksimal sebesar 87,665% dari 1005 adalah 881 sekolah. Jumlah sekolah Kristen & Katholik maksimum yang boleh dibuka adalah 9,917% dari 1005 adalah sekolah, adalah 99,665 dibulatkan 100 sekolah. Jumlah sekolah yang boleh dibuka maksimum untuk sekolah Hindu & Budha sebesar 2,418% dari 1005 adalah 24,30 dibulatkan 24 sekolah.

Tabel 11. SD (N & S) Umum, dan SD Afiliasi Agama & MI (N & S) yang direkomendasi di Yogyakarta

Jenis Sekolah	Dalam %	Jumlah Sekolah Agama & Afiliasi Agama	Jumlah Sekolah Agama & Afiliasi Agama Maksimal	Jumlah Sekolah Agama & Afiliasi Agama di Yogyakarta
Islam	87,665	1005	881	464
Kristen & Katholik	9,917	1005	100	85
Hindu & Budha	2,418	1005	24	0
Jumlah	100	-	1005	549

Jumlah sekolah SD Umum (SD N & S) di Yogyakarta minimal 1005 sekolah, SD Islam & MI (N & S) di Yogyakarta maksimal 881 sekolah ($881 < 1005$), SD Kristen & Katholik Maksimum 100 sekolah ($85 < 100$) dan SD Hindu & Budha di Yogyakarta Maksimum 24 sekolah. Kenyataan

dilapangan jumlah sekolah SD Umum (SD N & S) di Yogyakarta adalah 1462 sekolah. SD Islam & MI (N & S) di Yogyakarta 464 sekolah, SD Kristen & Katholik 85 sekolah, dan SD Hindu & Budha di Yogyakarta tidak ada (0) sekolah.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa semua sekolah SD Islam, MI negeri dan MI Swasta (464 < 881), SD Kristen dan SD Katholik (85 < 100), jumlahnya semua masih dibawah jumlah di ijin maksimum, dengan demikian jumlah sekolah SD, MI negeri dan MI Swasta, SD Kristen dan SD Katholik dianggap aman karena masih dibawah dari jumlah yang diijinkan.

SIMPULAN

Agama memegang peran penting terhadap perkembangan sosial ekonomi dan budaya di lingkungan masyarakat Indonesia. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Negara memberi kebebasan bagi penduduknya untuk memilih agama yang diyakininya. Kebebasan memilih agama merupakan Hak Azazi Manusia, oleh karena itu dilindungi oleh negara. Tidak diperbolehkan seseorang atau sekelompok orang memaksakan kehendaknya terhadap orang lain untuk memilih agama tertentu. Berdasarkan Penjelasan atas Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan *Khong Hu Cu (Confusius)*).

Prinsip dari penyelenggaraan pendidikan yang utama adalah memberi bekal ilmu kepada peserta didik untuk bisa hidup dan berkehidupan di kelak kemudian hari. Sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat memenuhi tuntutan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Artinya sekolah wajib menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang bisa mengatasi dan mengantisipasi berbagai keadaan di masa depan dengan tetap berpijak pada keadaan dan akar budaya serta kondisi real bangsa Indonesia. Pemerintah memiliki otoritas mengatur regulasi pendidikan harus bisa mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah termasuk yang kemungkinan dapat mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu alangkah baiknya jika dunia pendidikan atau sekolah-sekolah yang ada betul-betul bisa mewujudkan sekolah itu menjadi taman belajar yang menyenangkan bagi peserta didik, menanamkan jiwa toleran terhadap keberagaman, menjadikan manusia yang utuh sehat jasmani dan rohaninya untuk maju bersama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Hafsin. 2010. "Pemikiran Demokrasi di Indonesia antara Pembatasan dan Kebebasan Beragama". *Jurnal Analisa*. Vol. XVII, No. 01, Januari - Juni 2010 (diunduh 20 Juli 2020).
- Agus Ahmad Safei. 2016, "Toleransi Beragama di Era Bandung Juara." *Jurnal Kalam*. Vol. 10, No. 2, Desember 2016, hal. 403 – 422 (diunduh 27 Juli 2020).
- Alwis. 2012. "Urgensi Pendidikan Moral dalam Menjadikan Peserta Didik yang Berkarakter". Kerinci: PC. IMM.
- Depdiknas. 2003. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional", Bandung: Penerbit Citra Umbara.
- Alwis. 2012. "Urgensi Pendidikan Moral dalam Menjadikan Peserta Didik yang Berkarakter". Kerinci: PC. IMM.
- Tatang M. Amirin, 2012, "Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontektual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. h. 15
- Hasan Baharun & Robiatul Awwaliyah. 2017, "Pendidikan Multikultural dalam Menggulangi Narasi Islamisme di Indonesia". *Artikel*. Probolinggo: Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. h. 241 DOI: <http://dx.doi.org/10.15642/jpai.2017.5.2.224-243>.

- Entoh Tohani. 2012, “Kapabilitas Kultural Pemimpin Informal dalam Mewujudkan Masyarakat Harmonis”. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Volume 1, Nomor 1, Juni, 2012*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sejarah UNY. h. 28.
- Arif Unwanullah. 2012, “Transformasi Pendidikan untuk Mengatasi Konflik Masyarakat Dalam Perspektif Multikultur”. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Transformasi Pendidikan untuk Mengatasi Konflik*. Tuban: Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. h.56
- Mohammad Miftahusyai’an, Galih Puji Mulyoto. 2020, “Relasi Agama-Manusia dalam Spirit Pancasila (Membangun Egalitarianisme dalam Kemerdekaan Keyakinan)” *JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 Tahun 2020*. [http://journal.umpo.ac.id /index.php/JPK/index](http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index) ISSN 2527-7057, (Online) ISSN 2549-2683 (Print). h. 52.
- Ki Hadjar Dewantara,. 2004. “Bagian Pertama: Pendidikan. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa”, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Ki Sunarno Hadiwijoyo. 2006. “Perguruan Tamansiswa dalam Perspektif Perjuangan”. Jakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
- Ki Tyasno Sudarto. 2008. *Pendidikan Modern dan Relevansi Pemikiran Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Galangpress.
- Tutuk Ningsih. 2015. *Implementasi Pendidikan Karakter*. Purwokerto : STAIN Press.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan ke IV
<http://www.madjongke.com/2012/10/7-penyebab-orang-jadi-sombong.html> (diunduh 1 Agustus 2017).
<http://reformed.sabda.org/book/export/html/46> (diunduh 1 Agustus 2017).
<http://ardilamadi.blogspot.co.id/2013/07/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di-1175.html> (diunduh 1 Agustus 2017).
- <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>(diunduh 1 Agustus 2017)
www.dpr.go.id. “Undang-undang No. 1/PNPS/1965, Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama” (diunduh 30 Nopember 2020)